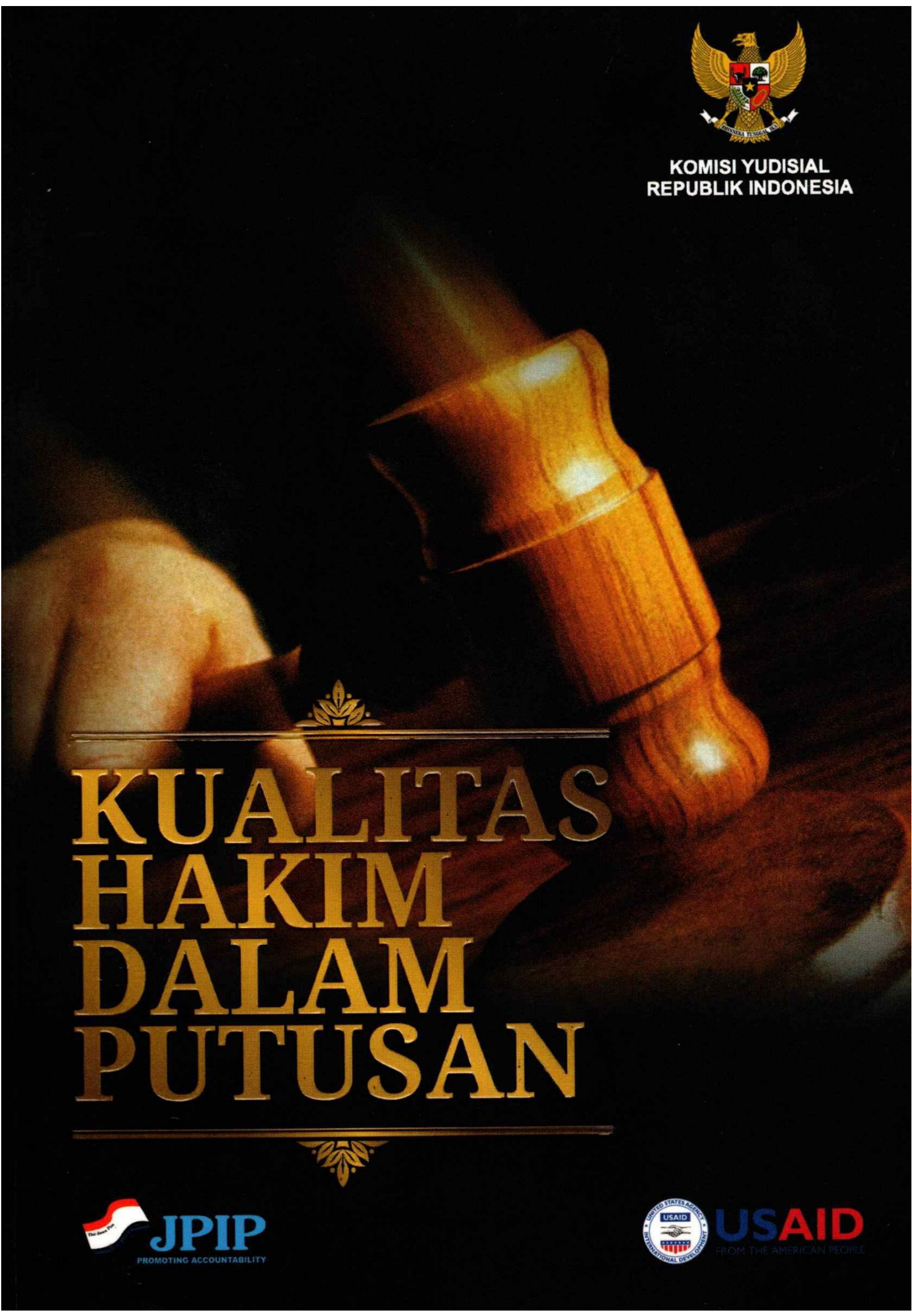




KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



KUALITAS HAKIM DALAM PUTUSAN



JPIP
PROMOTING ACCOUNTABILITY



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Kualitas Hakim dalam Putusan

*Laporan Penelitian
Putusan Hakim Tahun 2012*



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, 2014

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kualitas Hakim dalam Putusan

Pengarah

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si.

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab

Danang Wijayanto

Ketua

Roejito

Wakil Ketua

Tri Purno utomo

Tim Analisis

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Dr. Anton F Susanto, S.H., M.Hum.

Dr. FX Joko Priyono, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.

Asisten Analis

Elza Faiz

Hendro Sukmono

M. Ilham

Ikhsan Azhar

Nur Aini Fatmawati

Desain & Layout

Dodi Widodo

W. Eka Putra

Buku ini diterbitkan oleh:

Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax: 021-3906215, PO Box 2685

www.komisiyudisial.go.id

Daftar Isi

Daftar isi	iii
Daftar Tabel dan Ragaan	v
Kata Pengantar Tim Analisis	vii
Sekapur Sirih Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, dan Litbang Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	xi
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si.	xv
Kata Sambutan Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Rohman Budijanto	xvii
Bab I	
Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Kerangka Teoretik	6
G. Metode Penelitian	12
H. Organisasi Penelitian	15
I. Jadwal Kegiatan	16
J. Kendala dan Kelemahan dalam Penelitian	17
K. Objek Kajian	21

Bab II

Analisis Hasil Penelitian

- A. Analisis Kuantitatif 23
- B. Analisis Kualitatif 45

Bab III

Penutup

- A. Rangkuman 71
- B. Simpulan 76

Daftar Pustaka 78

Lampiran I 79

Lampiran II 128

Lampiran III 138

Daftar Tabel dan Ragaan

Tabel		
I.	Teknik Pengumpulan Data	14
II.	Jadwal Kegiatan	17
III.	Daftar Para Hakim Tinggi yang Putusannya Dianalisis (<i>Lampiran</i>)	
IV.	Kode Jejaring dan Putusan yang Dianalisis (<i>lampiran</i>)	
V.	Putusan dan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Banding (<i>lampiran</i>)	
VI.	Delapan Putusan yang Dikecualikan	27
VII.	Jumlah Putusan Perkara Pidana (<i>lampiran</i>)	
VIII.	Jumlah Putusan Perkara Perdata (<i>lampiran</i>)	
IX.	Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PT	29
X.	Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PT	29
XI.	Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PT	31
XII.	Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PT	31
XIII.	Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PT	33
XIV.	Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PT	33
XV	Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Pidana) PT	35
XVI	Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Perdata) PT	35

XVII.	Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PT	36
XVIII.	Profesionalisme Hakim Perkara Perdata PT	37
XIX.	Dasar Gugatan Perkara Perdata di PT	37
XX.	Klasifikasi Amar Putusan (Perkara Perdata) PT	38
XXI.	Aspek Pemenuhan Hukum Acara Pidana PN	38
XXII.	Aspek Pemenuhan Hukum Acara Perdata PN	39
XXIII.	Aspek Penerapan Hukum Pidana Material PN	40
XXIV.	Aspek Penerapan Hukum Perdata Material PN	41
XXV.	Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Pidana PN	42
XXVI.	Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara Perdata PN	42
XXVII.	Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Pidana) PN	43
XXVIII.	Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Perkara Perdata) PN	43
XXIX.	Profesionalisme Hakim Perkara Pidana PN	44
XXX.	Profesionalisme Hakim Perkara Perdata PN	44
XXXI.	Dasar Gugatan Putusan Perdata PN	45
Ragaan		
1.	Kerangka Pemikiran	6
2.	Organisasi Penelitian	16

Kata Pengantar

Dua tahun berturut-turut Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan penelitian yang bertitik tolak dari putusan pengadilan tingkat banding. Pada tahun-tahun sebelum itu, yang menjadi fokus penelitian adalah putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Alasan dari pemilihan objek kajian putusan pengadilan tingkat banding ini didasarkan pada kebutuhan Komisi Yudisial untuk memperoleh informasi tambahan terkait hakim-hakim di pengadilan tingkat banding, yang suatu saat akan dicalonkan menjadi hakim agung. Dengan mempelajari beberapa putusan yang pernah dihasilkan oleh hakim-hakim tersebut, sedikit-banyak dapat diperoleh gambaran kualitas putusan (karya profesi) mereka.

Hampir semua putusan yang dikaji ini berada dalam lingkungan peradilan umum, dan hanya ada satu dari lingkungan peradilan agama. Lingkup pengambilan sampel objek penelitian tersebut berdasar pada daftar nama-nama hakim pengadilan tingkat banding yang dipandang berpotensi untuk dicalonkan sebagai hakim agung dalam beberapa masa ke depan. Pada tahun ini rancangan penelitian mencakupi 75 orang hakim di pengadilan tingkat banding, sementara jumlah putusannya sendiri ada 150 buah, yang terdiri dari putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Tentu saja, pemilihan sampel putusan dengan berangkat dari figur hakim seperti ini memiliki konsekuensi tersendiri secara

metodologis. Daftar nama hakim yang diteliti dapat sewaktu-waktu berubah seiring dengan mobilitas kedinasan mereka.

Konklusi yang dihasilkan, pertama-tama wajib dibaca dalam konteks kebutuhan Komisi Yudisial untuk mencari informasi tambahan terkait dengan putusan-putusan yang dihasilkan para calon hakim agung. Kendati demikian, pengalaman dari penelitian-penelitian serupa yang dilakukan Komisi Yudisial sejak tahun 2007, telah memperkuat suatu pola kecenderungan jawaban yang sama atas putusan-putusan pengadilan di Indonesia, dalam tingkatan manapun. Artinya, hasil penelitian inipun sebenarnya dapat juga dibaca sebagai gambaran yang cukup kuat merepresentasikan kualitas putusan-putusan hakim kita pada umumnya.

Kerja keras dalam penelitian ini menjadi beban tanggung jawab banyak pundak. Secara konseptual dan kebijakan, program penelitian ini berada dalam kendali para Anggota Komisi Yudisial, khususnya Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H. Ketua dan para anggota Komisi Yudisial lainnya, tidak ketinggalan, ikut pula memberikan perhatian, bahkan tampil menjadi narasumber untuk menilai laporan penelitian dalam dua kali acara monitoring-evaluasi (monev) di Yogyakarta/ Medan dan Bandung. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Leksiga, Tenaga Ahli, dan staf sekretariat Komisi Yudisial adalah sosok-sosok penting yang mengawal program penelitian ini dari waktu ke waktu. Ujung tombak dari rangkaian penelitian ini tentu para dosen dan aktivis peneliti di tingkat jejaring. Jika tiap tim di tingkat jejaring terdiri dari sekitar lima orang, berarti ada sekitar 75 orang peneliti yang berkontribusi dalam penelitian atas 150 putusan pengadilan tersebut. Kepada semua pihak di atas, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian kali inipun terdapat dua pendekatan yang digunakan sekaligus. Pendekatan kuantitatif umumnya dipakai untuk memperoleh keluasan, sementara pendekatan

kualitatif digunakan untuk mendapatkan kedalaman. Dr. F.X. Joko Priyono mendapat tugas khusus untuk mengerjakan laporan dengan pendekatan kuantitatif, sementara pendekatan kualitatif digarap bertiga oleh anggota tim analisis lainnya.

Pada akhirnya, laporan akhir penelitian ini pun disadari masih sangat jauh dari sempurna untuk dapat memenuhi harapan semua pihak. Namun, satu harapan sederhana kiranya tetap layak dilayangkan, yakni agar laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan upaya kita semua bagi perbaikan kualitas penegakan hukum di Tanah Air, khususnya sejauh hal itu terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas-tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jakarta, Juni 2014

Tim Analisis

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan penelitian putusan hakim dari waktu ke waktu, dan dalam setiap program penelitian tersebut selalu terbuka dilakukan modifikasi sehubungan dengan adanya kebutuhan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan peranannya. Penelitian putusan hakim tahun 2012, misalnya, didisain antara lain untuk menopang tugas Komisi Yudisial dalam memotret kualitas putusan dari para hakim pengadilan tingkat banding yang suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung. Bersamaan dengan itu, disadari bahwa putusan-putusan pengadilan banding biasanya juga tidak cukup detail memuat uraian pertimbangannya karena sebagian tinggal mengambil alih pertimbangan hakim di pengadilan tingkat sebelumnya. Itulah sebabnya, putusan-putusan pengadilan tinggi ini dianalisis secara tandem dengan putusan-putusan pengadilan tingkat pertama.

Tujuan praktis di atas tentu tidak boleh sampai mengurangi pertanggungjawaban ilmiah terhadap proses dan hasil penelitian ini. Di satu sisi, penelitian ini ingin menjadikan putusan hakim sebagai salah satu bahan informasi. Di sisi lain, ada kesadaran penuh

bahwa teks putusan sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan banyak hal yang diperlukan. Teks putusan tersebut perlu diperkaya dengan data tambahan untuk memberi latar belakang (konteks) munculnya putusan tersebut. Data tambahan ini dapat digali melalui penggalangan data primer, khususnya dengan teknik wawancara.

Basis awal dari penelitian ini adalah personalia para hakim yang saat ini bertugas di pengadilan tingkat banding. Nama-nama hakim tersebut ditetapkan di dalam daftar yang disiapkan oleh Komisi Yudisial. Putusan hakim-hakim tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel putusan tidak dipilih secara random, melainkan secara purposif oleh hakim pengadilan tingkat banding itu sendiri. Dengan teknik pemilihan sampel demikian, dapat diasumsikan putusan yang diberikan adalah [salah satu] putusan "terbaik" selama perjalanan karir hakim tersebut. Dapat saja dinyatakan bahwa idealnya setiap putusan adalah selalu putusan terbaik yang bisa dihadirkan dalam perkara tertentu, sehingga pengertian "terbaik" disini dapat saja berangkat dari pilihan subjektif para hakim. Untuk itu, kriteria "terbaik" dalam konteks ini lebih diartikan sebagai putusan yang mengesankan sepanjang karier sebagai hakim di pengadilan tinggi, dilihat dari aspek kompleksitas perkara yang ditangani yang memicu hakim untuk melakukan penemuan hukum. Tentu saja, keterlibatan individual hakim yang bersangkutan juga penting diperhatikan, mengingat posisi yang bersangkutan di dalam majelis hakim itu dapat sebagai ketua atau anggota. Putusan yang dipilih itu harus putusan yang dipandang oleh hakim tersebut sebagai karya profesi yang secara intens memang mewakili pandangannya, terlepas apapun posisinya di dalam majelis itu.

Sama seperti halnya dengan penelitian tahun-tahun lalu, penelitian putusan hakim tahun ini juga melibatkan jejaring Komisi Yudisial. Pilihan terhadap jejaring peneliti ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dalam keikutsertaan jejaring dalam penelitian tahun-tahun sebelumnya, juga representasi kewilayahan Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, diperoleh 15 institusi perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang akan dilibatkan sebagai peneliti di tingkat jejaring.

Putusan pengadilan tingkat banding tentu saja berhubungan dengan pengadilan tingkat pertama. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis suatu perkara dengan luaran (*output*) dua laporan sekaligus, yakni laporan putusan pengadilan tingkat banding dan laporan pengadilan tingkat pertama. Laporan putusan pengadilan tingkat banding dikorelasikan dengan figur hakim tertentu, sementara laporan putusan pengadilan tingkat pertama lebih diarahkan pada majelis hakim secara keseluruhan. Bagaimanapun juga hakim-hakim pengadilan tingkat pertama ini pada gilirannya tentu berpotensi pula mengisi posisi-posisi strategis dalam lembaga peradilan di Tanah Air. Basis data dari analisis putusan-putusan pengadilan tingkat pertama ini, dengan demikian, tidak hanya bermanfaat untuk menjadi komparasi terhadap hasil analisis putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara yang sama, tetapi juga bermanfaat untuk memperkaya basis data tentang hakim-hakim yang saat ini masih berkarir di pengadilan tingkat pertama, sekaligus untuk memotret gambaran umum tentang putusan-putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah dilakukan melalui penelitian-penelitian sebelumnya.

Hal-hal yang dapat dilacak dalam putusan (secara tekstual) seperti ketaatan pada hukum acara, hukum

materiil, penalaran hukum, penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dijadikan fokus permasalahan. Keempat permasalahan pokok ini mengarahkan pada permasalahan kelima yang juga diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang profesionalisme hakim.

Butir 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat terminologi “profesional” yang dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional kemudian mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Derivasi dari butir kode etik ini dalam batas-batas tertentu juga mengacu pada empat fokus pertanyaan terkait ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan pemikiran di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara?
2. Terkait dengan hukum materiil, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang didakwa/digugat?
3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

4. Apakah putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis)?
5. Bagaimana profesionalisme hakim dalam penyelesaian perkara ini?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian di atas dijawab lewat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama yang menjadi sampel penelitian ini dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum material, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, untuk sekaligus menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) dan hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.
2. Sebagai sarana berbagi (*sharing*) informasi akademisi dan praktisi hukum; bagi akademisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek praktik hukum (*practically aspect enrichment*); bagi praktisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek teoritik hukum (*theoretically aspect enrichment*).
3. Memperkuat hubungan kerja sama KY dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya

KUALITAS HAKIM DALAM PUTUSAN



Salah satu hal yang menarik yang terus dibudayakan oleh Komisi Yudisial selama ini adalah melibatkan kalangan akademis dan lembaga swadaya masyarakat yang notabene adalah jejaring mereka dalam pelaksanaan program kerja penelitian putusan. Pelibatan jejaring dilakukan dengan cara proses penunjukan secara langsung. Penunjukan itu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap jejaring dalam keikutsertaan mereka di tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya sehubungan dengan putusan-putusan yang dijadikan objek penelitian, Komisi Yudisial dan tim pakar sepakat untuk memilih putusan-putusan pengadilan tinggi dan tingkat pertama sebagai objek penelitian. Pemilihan objek penelitian itu disebabkan Komisi Yudisial ingin memotret kualitas putusan dari para hakim pengadilan tingkat banding yang suatu saat berpotensi untuk diusulkan sebagai hakim agung.

Untuk memotret kualitas putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pertama tersebut, Komisi Yudisial dan tim pakar kemudian menjadikan lima indikator sebagai tolak ukur, yaitu ketaatan pada hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta profesionalisme hakim.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Diterbitkan atas kerjasama :

Pusat Analisis dan Layanan Informasi © 2014

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189, PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id

The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi

Graha Pena Lt.8 Suite 801
Jl. Jend. A. Yani No.88, Surabaya 60234
Telp. 031 8202 038, Fax. 031 8202 081
Website : www.jpis.or.id



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE